

Abstract

The inherent complexity of disasters places government agencies and societies in vulnerable situations. This research uses cross-sector collaboration as the framework of analysis in looking into how the government manages typhoon-related emergencies. Primarily, the structure and governance processes of the disaster response network of the most susceptible areas in Region X, Philippines. This study uses the mixed-method approaches to Social Network Analysis and Structural Equation Modelling through Partial Least Squares were utilized in evaluating the network structure and governance processes of the Philippine disaster management and its implications for disaster governance. This research covers the data gathered from the 92 samples (44 respondents, 18 key informants and 30 typhoon survivors) from Region X, Province of Misamis Oriental, Cagayan de Oro and Iligan City. The findings revealed that the mandated tall-structure and the lead-organization form of network governance as stipulated in Republic Act 10121, does not work in the regional and local disaster management networks in Region X, particularly during Typhoon Washi in 2010. Moreover, the findings highlight the role of public managers and the significance of the previous performance of the network in the collaborative disaster management. Further, the findings revealed that the community remains to believe that their respective local officials are capable of helping them in times of need and are therefore can be trusted despite the shortcomings during the 2011 Typhoon Washi. With these, it is therefore concluded that the disaster management structure significantly affects the governance processes of the network. In order for the disaster management network to be effective, the structure of the DRRM network should evolve. Additionally, disaster leadership should be effective enough to provide captivating incentives, build interdependencies and strengthen trust among members through a sustained collaborative activity. The absence of a strong intergovernmental and inter-organizational relationships and disaster management champions, disaster response operations in the country will remain in limbo.

Keywords: collaboration, disaster management, governance, network analysis

Abstrak

Kompleksitas yang inheren dari bencana menempatkan lembaga pemerintah dan masyarakat dalam situasi yang rentan. Penelitian ini menggunakan kolaborasi lintas sektor sebagai kerangka analisis dalam melihat bagaimana pemerintah mengelola keadaan darurat terkait topan. Terutama, struktur dan proses tata kelola jaringan tanggap bencana dari daerah-daerah yang paling rawan di Wilayah X, Filipina. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran untuk Analisis Jaringan Sosial dan Pemodelan Persamaan Struktural melalui Partial Least Squares digunakan dalam mengevaluasi struktur jaringan dan proses tata kelola manajemen bencana Filipina dan implikasinya terhadap tata kelola bencana. Penelitian ini mencakup data yang dikumpulkan dari 92 sampel (44 responden, 18 informan kunci dan 30 korban topan) dari Wilayah X, Provinsi Misamis Oriental, Cagayan de Oro dan Iligan City. Temuan-temuan tersebut mengungkapkan bahwa struktur tinggi yang dimandatkan dan bentuk organisasi pemimpin dari tata kelola jaringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik 10121, tidak bekerja dalam jaringan manajemen bencana regional dan lokal di Wilayah X, khususnya selama Topan Washi pada tahun 2010. Selain itu, Temuan menyoroti peran manajer publik dan pentingnya kinerja jaringan sebelumnya dalam manajemen bencana kolaboratif. Lebih lanjut, temuan ini mengungkapkan bahwa masyarakat tetap percaya bahwa pejabat lokal mereka masing-masing mampu membantu mereka pada saat dibutuhkan dan oleh karena itu dapat dipercaya meskipun ada kekurangan selama Topan Washi tahun 2011. Dengan ini, oleh karena itu disimpulkan bahwa struktur manajemen bencana secara signifikan mempengaruhi proses tata kelola jaringan. Agar jaringan manajemen bencana menjadi efektif, struktur jaringan DRRM harus berevolusi. Tata kelola bersama di jaringan tanggap bencana lokal harus dipertimbangkan untuk meningkatkan kompetensi lembaga lokal. Selain itu, kepemimpinan bencana harus cukup efektif untuk memberikan insentif yang menarik, membangun interdependensi dan memperkuat kepercayaan di antara anggota melalui aktivitas kolaboratif yang berkelanjutan. Ketiadaan hubungan antar pemerintah dan antar-organisasi dan juara manajemen bencana yang kuat, operasi tanggap bencana di negara ini akan tetap dalam keadaan limbo.